



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Ketua BPD dan PID Diperiksa Terkait DD

KOTA BINTUHAN - Setelah enam saksi diperiksa penyidik Tipikor dalam kasus korupsi dana desa (DD) Desa Wayhawang tahun 2017. Kemarin (8/1) giliran Ketua Badan Permusyawaratan Deesa (BPD), Ersan jalani pemeriksaan sebagai saksi. Selain itu, saksi lainnya yaitu Pendamping Inprastruktur Desa (PID) Suhermanto juga dimintai keterangan.

Merkea ditanya seputar aliran dana dan teknis pekerjaan DD tahun 2017. Dan semuanya mengakui kalau yang berperan adalah mantan Kades Desa Wayhawang Mi. Tidak hanya itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pun tidak difungsikan sebagai mana mestinya.

Kendati sudah enam saksi yang diperiksa, mulai dari sekdes, bendahara desa, pembuat gambar dan RAB DD Wayhawang dan juga Ketua TPK, namun penyidik

belum melakukan penetapan tersangka. Semuanya masih diperiksa sebagai saksi terkait pekerjaan DD Wayhawang tahun 2017 yang merugikan negara Rp 280 juta.

Kerugian negara ini timbul setelah hasil audit dari BPK dan pihak Inspektur Kaur. Dan jumlahnya lebih kecil dari hasil penghitungan tim Unit Tipikor Polres Kaur sebelumnya yaitu Rp 300 juta. Selain enam saksi ini penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pemasok material DD Wayhawang tahun 2017 tersebut secara bertahap.

"Semua yang terkait akan kita mintai keterangan, bagaimana prosesnya dan berapa besaran dana yang diberikan baik itu ke TPK, BPD dan pihak lainnya. Termasuk aliran dana ke penyedia barang atau toko bangunan dan sebagainya. Untuk saat ini semua

saksi kita periksa dan belum ada tersangka," kata Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S,IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si kemarin.

Dana terhimpun kerugian negara Rp 280 juta lebih tersebut di dapat dari kekurangan volume pada pembuatan jalan sentral produksi dan juga telford. Sehingga pekerjaan tidak sesuai dan tidak maksimal sesuai harapan masyarakat sehingga ada kerugian negara dari pembangunan jalan ini sekitar Rp 232 juta lebih.

Kemudian ada selisih belanja BBM Rp 49,7 juta, kekurangan bayar pajak sewa buld dozer Rp 1 juta. Kemudian ada juga kekurangan pajak sewa excavator sebesar Rp 562 ribu. Kemudian ada tiga item belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang totalnya mencapai Rp 51 juta lebih. (cik)